

**PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH ANTARA HGU PT MUTIARA AGAM**

**DENGAN KUD TIKU V JORONG**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**Oleh :**

**MELVI JASYANTI**

**2120122016**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

## **PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH ANTARA HGU PT MUTIARA AGAM DENGAN KUD TIKU V JORONG**

Melvi Jasyanti, 2120122016, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Tahun 2024

### **ABSTRAK**

Sengketa Pertanahan antara PT Mutiara Agam dan KUD tiku V Jorong ini berawal dari ketidakjelasan sepadan tanah. PT Mutiara Agam ini memakai tanah dan sudah menanami sebagian dengan kelapa sawit sehingga pihak KUD tidak terima lahan yang seharusnya masuk kedalam bagian plasma KUD Tiku V Jorong sehingga dilakukan proses penyelesaian sengketa dengan mediasi. Penelitian ini mengajukan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana proses mediasi antara PT Mutiara Agam dengan KUD Tiku V Jorong? 2. Bagaimana penetapan batas bidang tanah HGU PT Mutiara Agam dengan KUD Tiku V Jorong? 3. Bagaimana pemeliharaan data pendaftaran tanah karena perubahan data fisik HGU PT Mutiara Agam dan KUD Tiku V Jorong. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian di dapatkan bahwa: 1. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Para pihak ini menyerahkan semua proses pengukuran kembali dan sepakat menerima ketentuan-ketentuan sesuai keadaan di lapangan, dimana para pihak menyelesaikan secara musyawarah yang saling tidak merugikan. 2. Penetapan batas bidang tanah HGU PT Mutiara Agam dengan KUD Tiku V Jorong. Bahwa penyelesaian sengketa pertanahan antara PT Mutiara Agam dengan KUD Tiku V Jorong telah menemukan kata mufakat dan di lakukan pengukuran ulang yang menerbitkan HGU baru sekaligus perpanjangan HGU PT Mutiara Agam. 3. Pelaksanaan Pengelolaan Data Fisik dan data Yuridis dalam Pemeliharaan Pendaftaran hak atas tanah dalam untuk Mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara pada Kantor Pertanahan, untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pengelolaan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam pendaftaran hak atas tanah.

**Kata Kunci** : Pengukuran ulang, Penyelesaian sengketa, Pengembalian Batas.

# **DETERMINATION OF LAND BOUNDARIES BETWEEN HGU PT MUTIARA AGAM AND KUD TIKU V JORONG**

Melvi Jasyanti, 2120122016, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2024.

## **ABSTRACT**

The land dispute between PT Mutiara Agam and KUD Tiku V Jorong originated from unclear land issues. PT Mutiara Agam uses land and has planted part of it with oil palm so that the KUD does not accept the land which should be included in the plasma section of KUD Tiku V Jorong so that a dispute resolution process is carried out through mediation. This research proposes a problem formulation, namely: 1. What is the mediation process between PT Mutiara Agam with KUD Tiku V Jorong? 2. How are the boundaries of PT Mutiara Agam's HGU land plot determined with KUD Tiku V Jorong? 3. How is land registration data maintained due to changes in the physical data of HGU PT Mutiara Agam and KUD Tiku V Jorong. This research uses empirical juridical methods. The results of the research showed that: 1. Mediation is a form of alternative dispute resolution outside of court. The aim of mediation is to resolve disputes between the parties by involving a neutral and impartial third party. These parties submit all re-measurement processes and agree to accept the provisions according to the conditions in the field, where the parties resolve through deliberations that do not harm each other. 2. Determination of the boundaries of PT Mutiara Agam's HGU land plot with KUD Tiku V Jorong. That the resolution of the land dispute between PT Mutiara Agam and KUD Tiku V Jorong has reached consensus and a re-measurement was carried out which issued a new HGU and at the same time extended the HGU of PT Mutiara Agam. 3. Implementation of Physical Data and Juridical Data Management in the Maintenance of Land Rights Registration in order to prevent the emergence of State Administrative Disputes at the Land Office, to realize legal certainty through the management of physical data and juridical data in the bookkeeping of rights in the registration of land rights.

**Keywords:** Remeasurement, Dispute resolution, Limit Returns.

